



PEMINDAHAN IKN: PELUANG DAN TANTANGAN

ANALISIS DAMPAK KEBIJAKAN EKONOMI

Dr. M. Rizal Taufikurahman

(Kepala Pusat Makroekonomi and Finance INDEF)

Talkshow dengan Topik: Mahasiswa Kota Bandung Bicara Pemindahan Ibu Kota Negara

Bandung | 16 November 2023

Outline

- Review Konsekuensi Ekonomi: Pindah IKN
- Catatan Kondisi Makro Ekonomi Kekinian
- Kesiapan Ketahanan Fiskal dan Moneter di Tengah Ketidakpastian Global dan Nasional
- Pemerataan Pembangunan dan Kemiskinan

Review Konsekuensi Ekonomi: Pindah IKN

Lesson Learn Beberapa Negara 100 Tahun Terakhir

Daftar negara yang memindahkan ibu kota negara dalam 100 tahun terakhir

Negara	Ibu Kota lama	Ibu Kota baru	Tahun pemindahan	Jarak (km)
Russia	Saint-Petersburg	Moscow	1918	633
Albania	Durrës	Tirana	1920	39
Turki	Istanbul	Ankara	1923	351
Australia	Melbourne	Canberra	1927	472
Zambia	Livingston	Lusaka	1935	484
Guinea-Bissau	Bolama	Bissau	1941	40
China	Nanjing	Beijing	1949	1219
Mauritania	Saint-Louis	Nouakchott	1957	303
Senegal	Saint-Louis	Dakar	1958	265
Brasil	Rio de Janeiro	Brasília	1960	754
Botswana	Gaborone	Maikeng	1961	138
Rwanda	Butare	Kigali	1962	80
Uganda	Entebbe	Kampala	1962	35
North Yemen	Ta'izz	Sana'a	1962	198
Pakistan	Karachi	Islamabad	1966	1144
Libya	Bayda/benghazi	Tripoli	1969	1000
Belize	Belmopan	Belize City	1970	68
Malawi	Zomba	Lilongwe	1974	227

Sumber: Berbagai Sumber (2022)

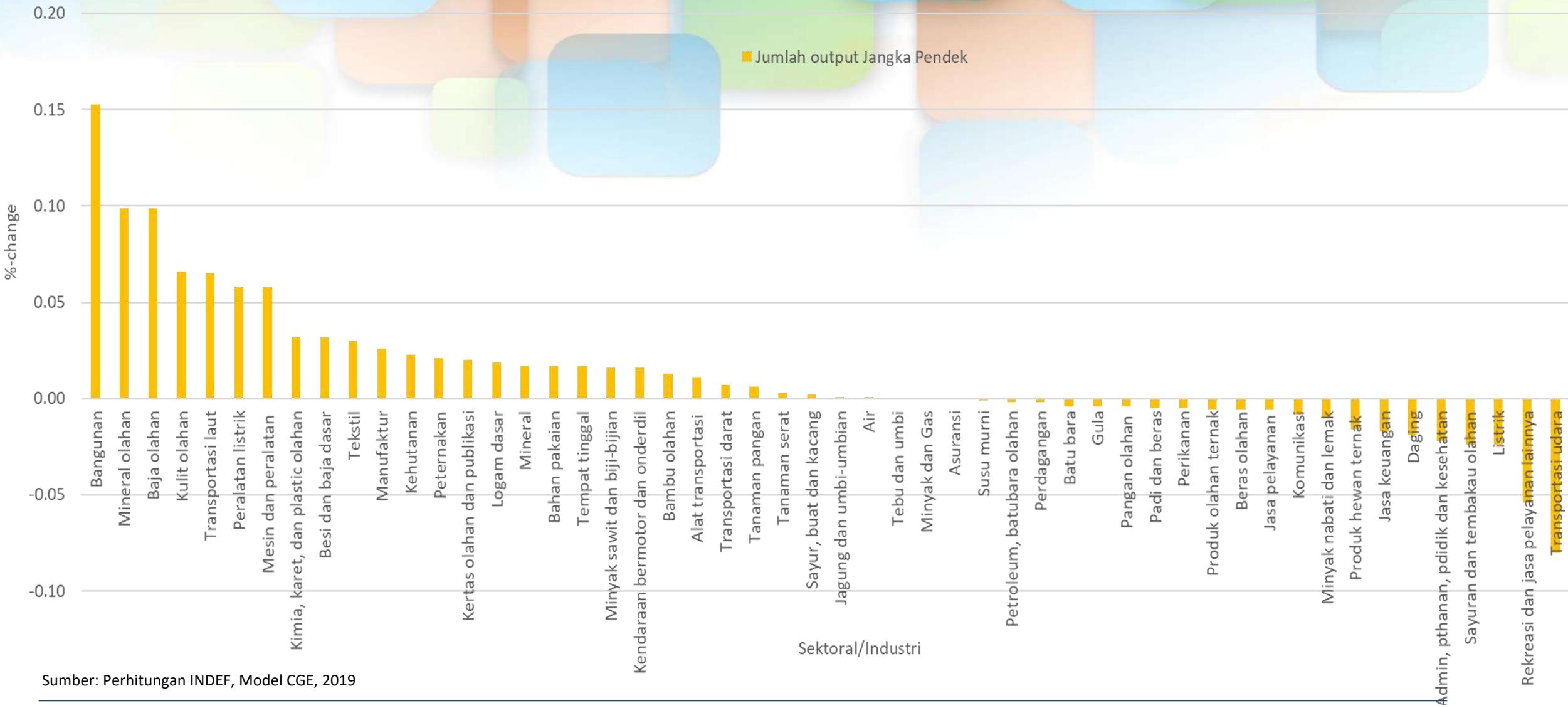
Negara	Ibu Kota lama	Ibu Kota baru	Tahun pemindahan	Jarak (km)
Côte d'Ivoire	Abidjan	Yamoussoukro	1983	228
Libya	Tripoli	Sirte	1988	463
Chile*	Santiago	Vina del Mar	1990	98
Nigeria	Lagos	Abuja	1991	541
Tanzania	Dar es Salaam	Dodoma	1996	571
Kazakhstan	Almaty	Astana	1997	974
Jerman	Bonn	Berlin	1999	604
Malaysia**	Kuala Lumpur	Putrajaya	1999	47
Myanmar	Yangon	Naipyidaw	2005	330
Korea Selatan	Seoul	Sejong	2009	137
UAE	Abu Dhabi	Khalifa City	2012	30
Georgia	Tbilisi	Kutaisi	2012	230
Afghanistan	Kabul	New Kabul	2013	25

*hanya Legislatif **hanya eksekutif

Sumber: Rossman (2017)

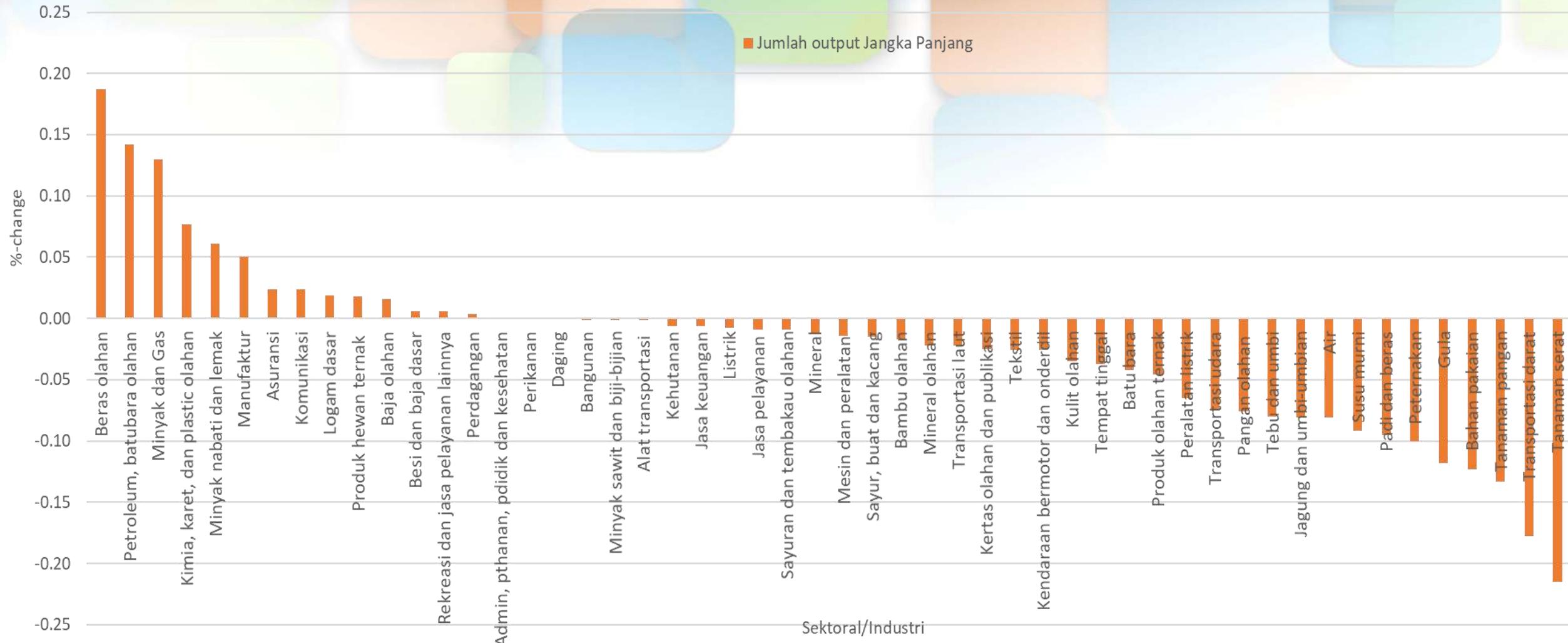
- Sedangkan jarak antara Jakarta kalimantan Timur adalah 2.333 km.

Dampak Jangka Pendek atas Perpindahan IKN Terhadap Jumlah Output pada Perindustrian Indonesia



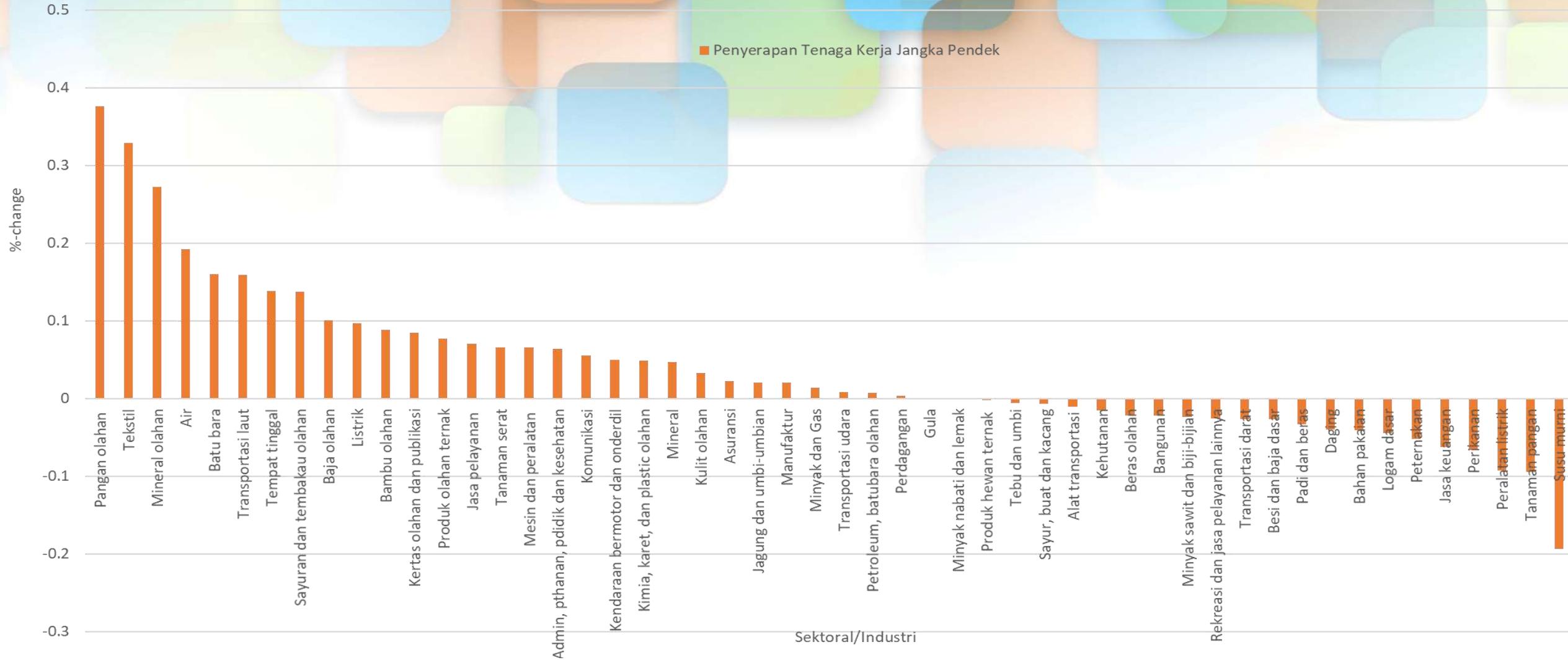
Sumber: Perhitungan INDEF, Model CGE, 2019

Dampak Jangka Panjang atas Perpindahan IKN Terhadap Jumlah Output pada Perindustrian Indonesia



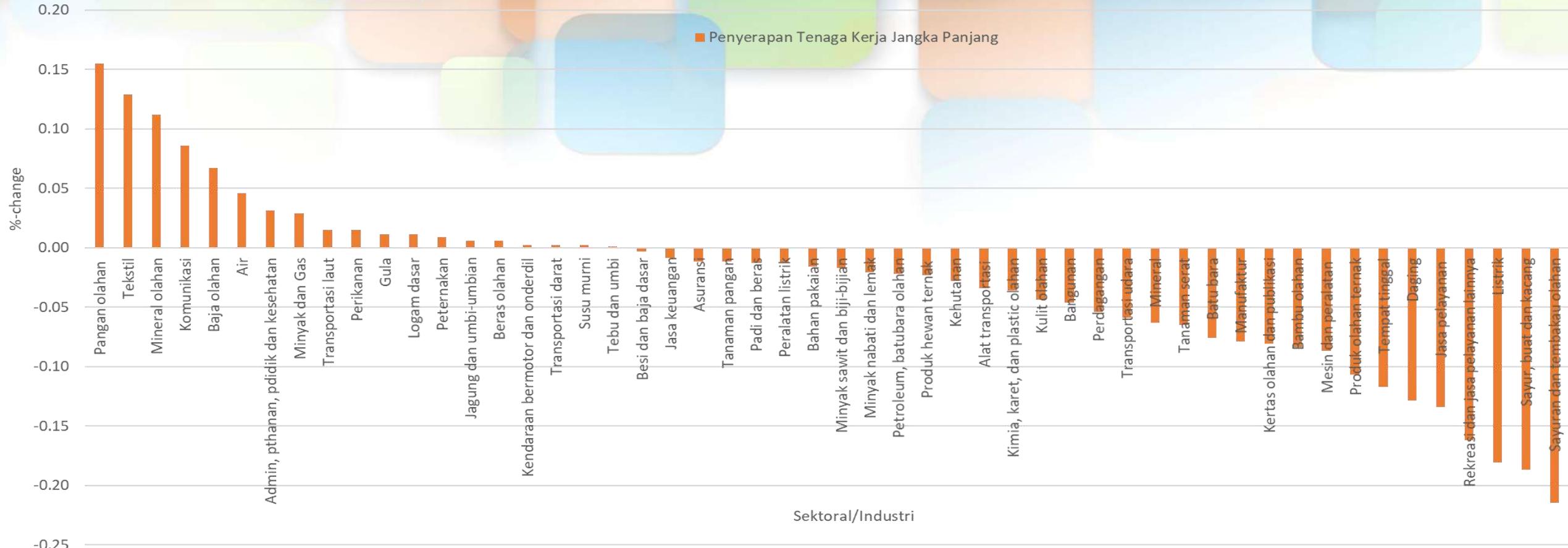
Sumber: Perhitungan INDEF, Model CGE, 2019

Dampak Jangka Pendek atas Perpindahan IKN Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja pada Perindustrian Indonesia



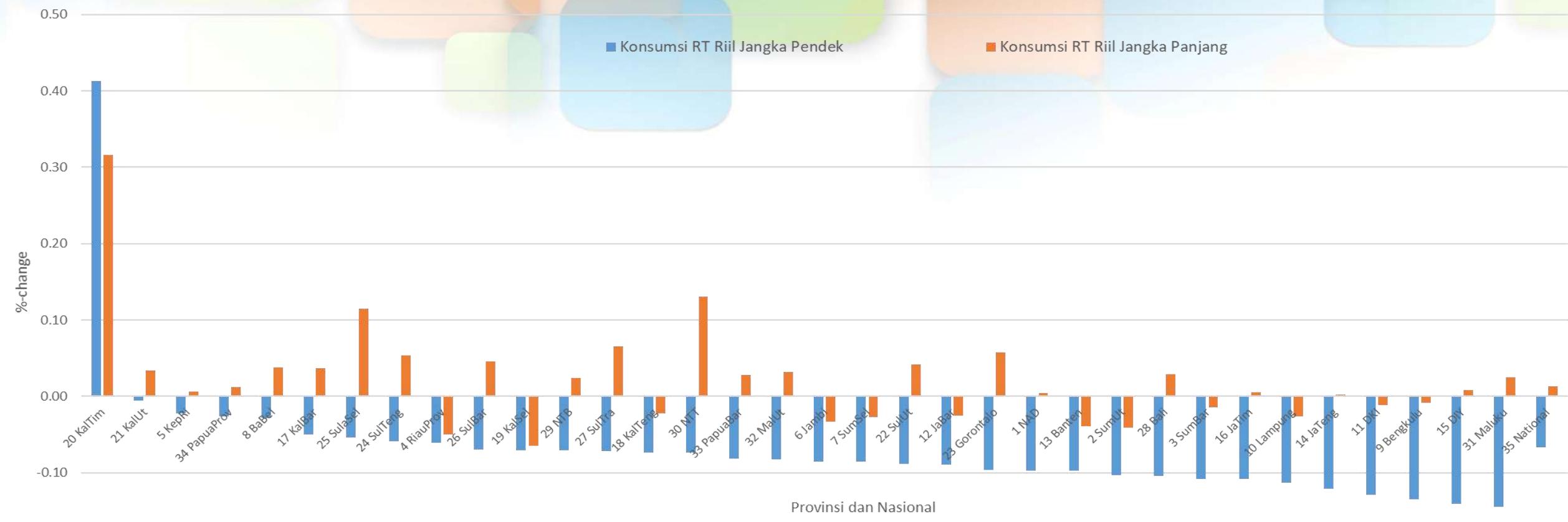
Sumber: Perhitungan INDEF, Model CGE, 2019

Dampak Jangka Panjang atas Perpindahan IKN Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja pada Perindustrian Indonesia



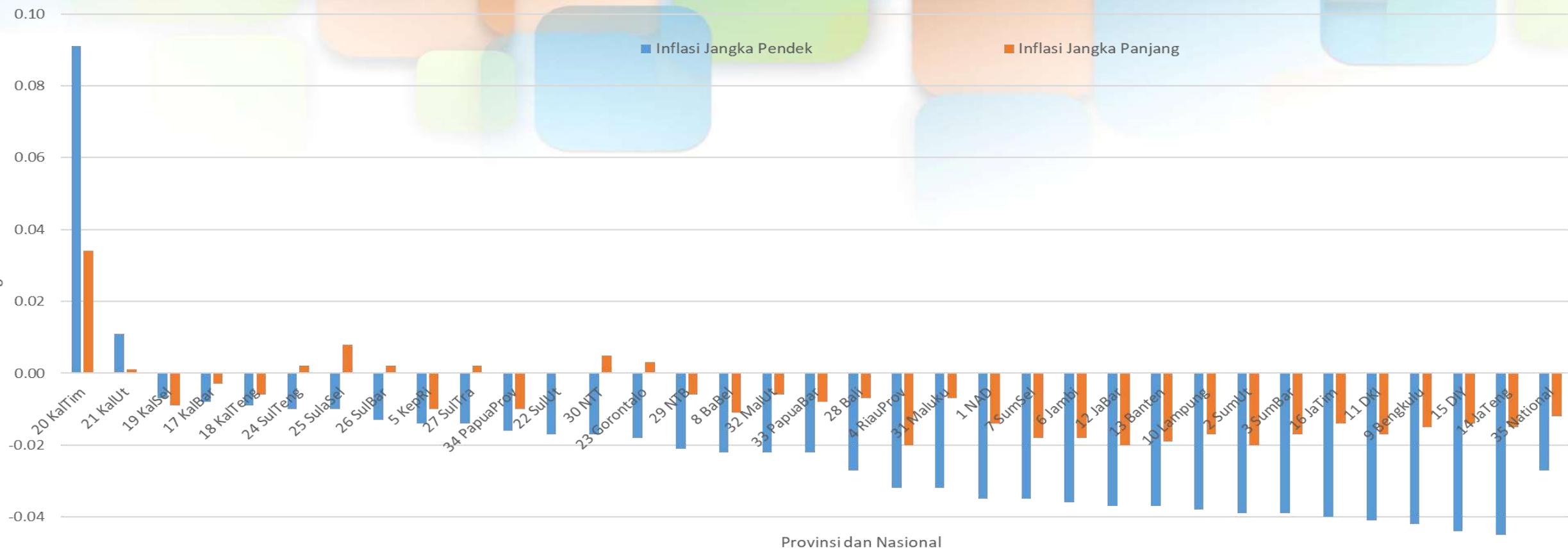
Sumber: Perhitungan INDEF, Model CGE, 2019

Dampak Jangka Pendek dan Jangka Panjang atas Perpindahan IKN Terhadap Konsumsi Riil per Provinsi dan Nasional



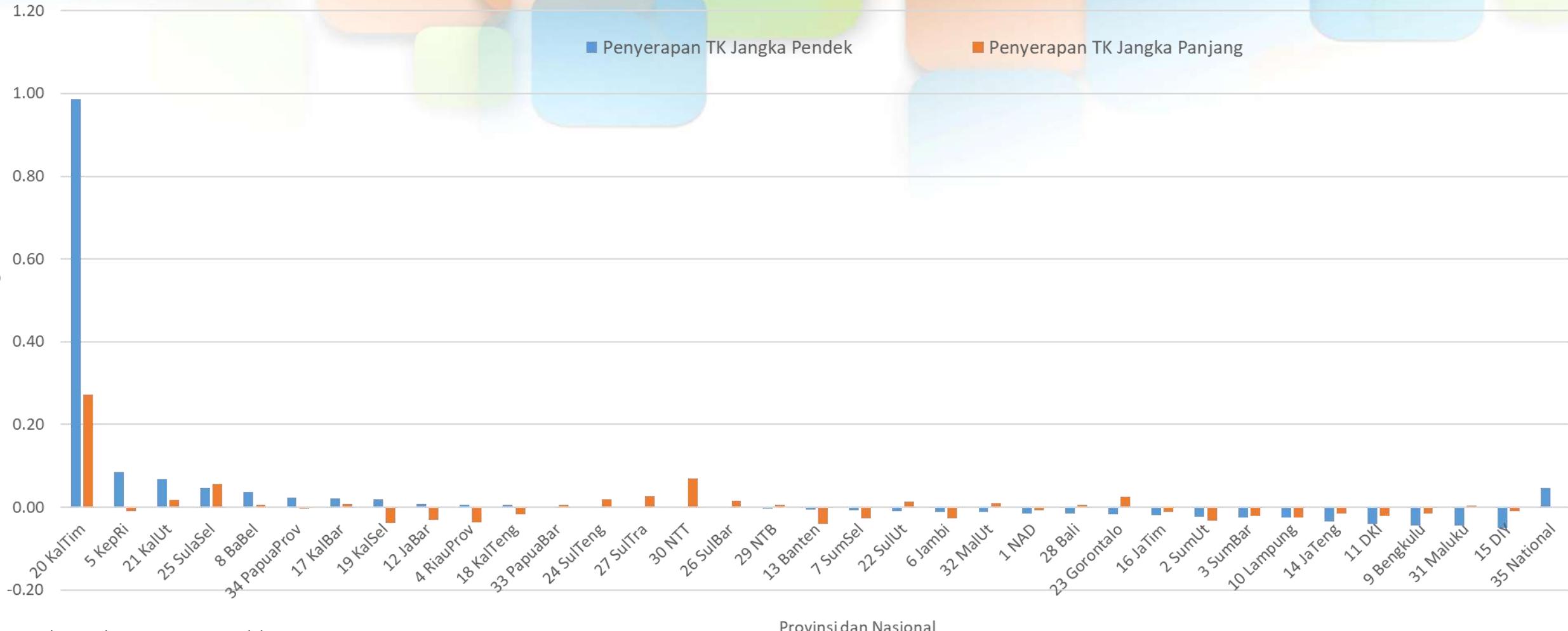
Sumber: Perhitungan INDEF, Model CGE, 2019

Dampak Jangka Pendek dan Jangka Panjang atas Perpindahan IKN Terhadap Tingkat Inflasi per Provinsi dan Nasional



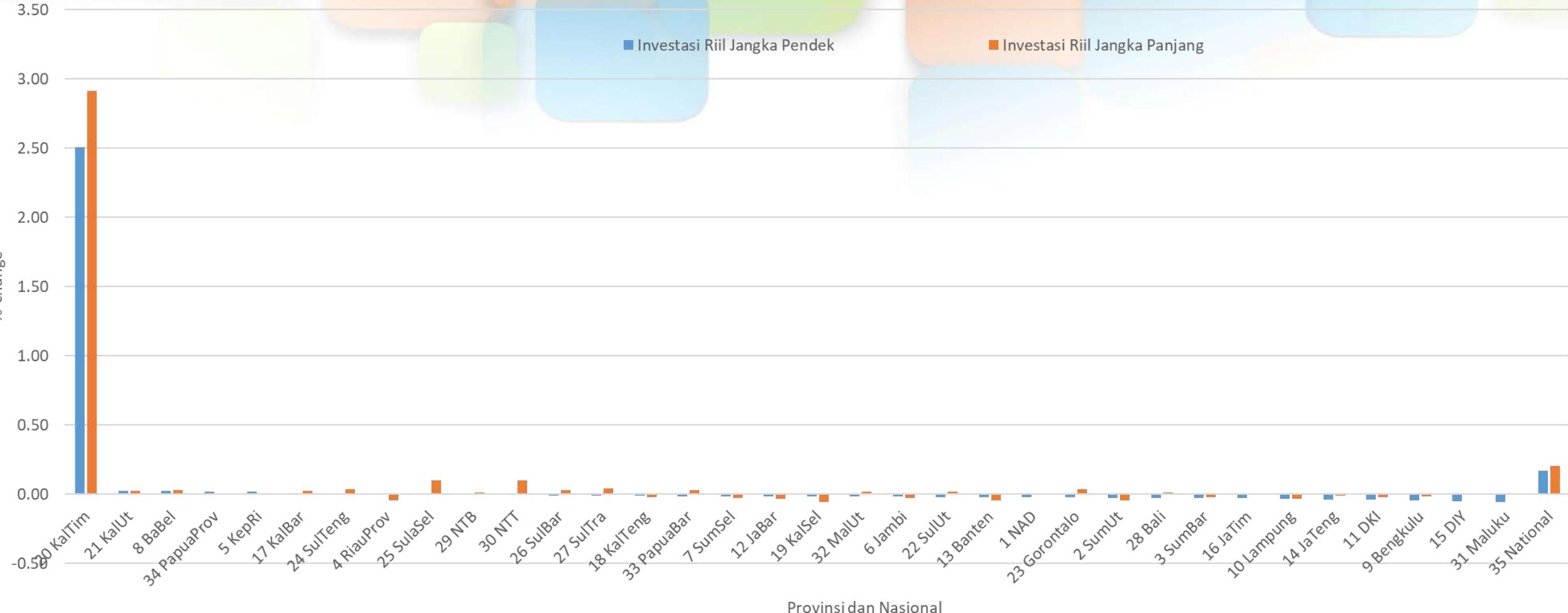
Sumber: Perhitungan INDEF, Model CGE, 2019

Dampak Jangka Pendek dan Jangka Panjang atas Perpindahan IKN Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja per Provinsi dan Nasional



Sumber: Perhitungan INDEF, Model CGE, 2019

Dampak Jangka Pendek dan Jangka Panjang atas Perpindahan IKN Terhadap Investasi Riil per Provinsi dan Nasional



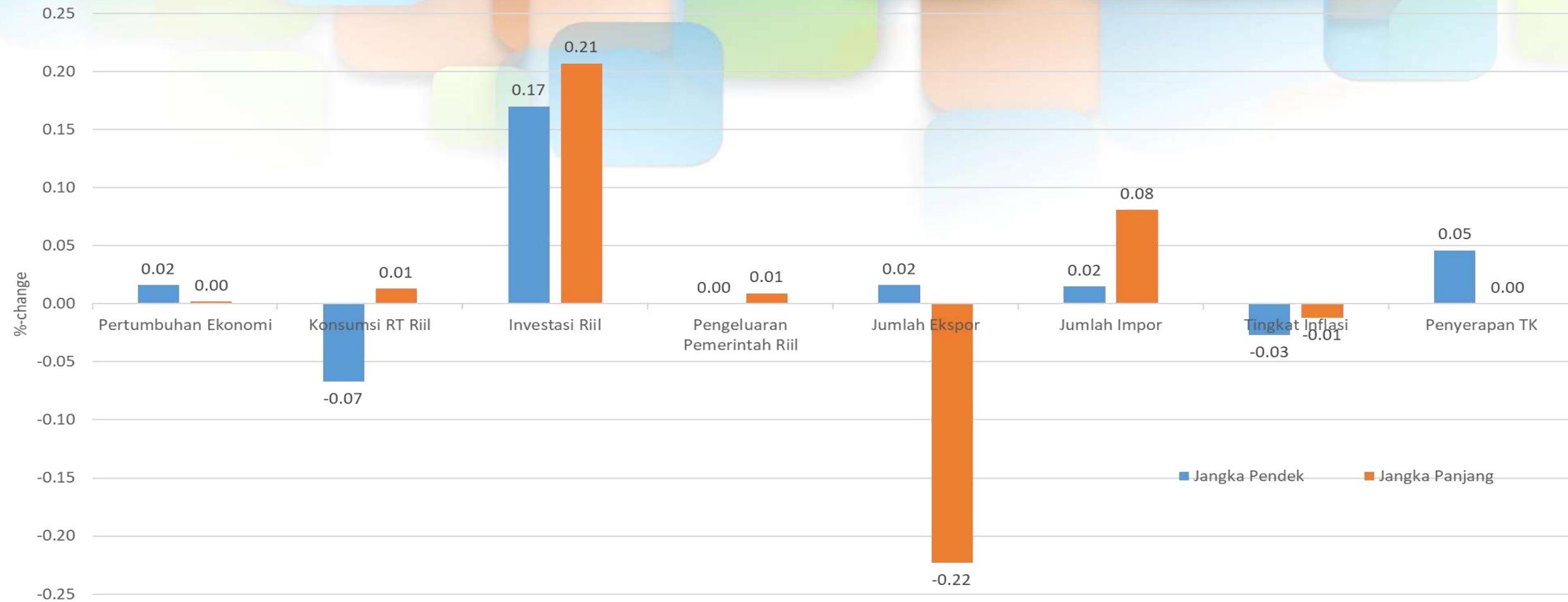
Sumber: Perhitungan INDEF, Model CGE, 2019

Dampak Jangka Pendek dan Jangka Panjang atas Perpindahan IKN Terhadap Pertumbuhan Ekonomi per Provinsi dan Nasional



Sumber: Perhitungan INDEF, Model CGE, 2019

Dampak Jangka Pendek dan Jangka Panjang atas Perpindahan IKN Terhadap Indikator Ekonomi Makro Nasional



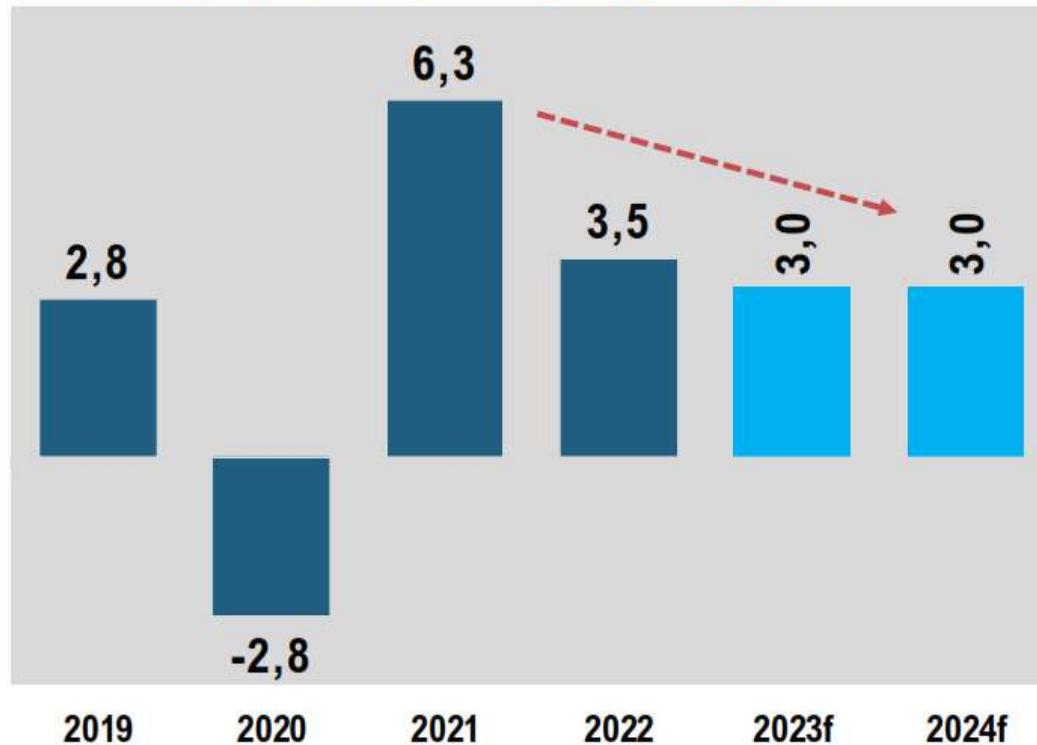
Sumber: Perhitungan INDEF, Model CGE, 2019

Catatan Kondisi Makro Ekonomi Kekinian

EKONOMI GLOBAL MELEMAH DITENGAH INFLASI YANG SULIT DIKENDALIKAN

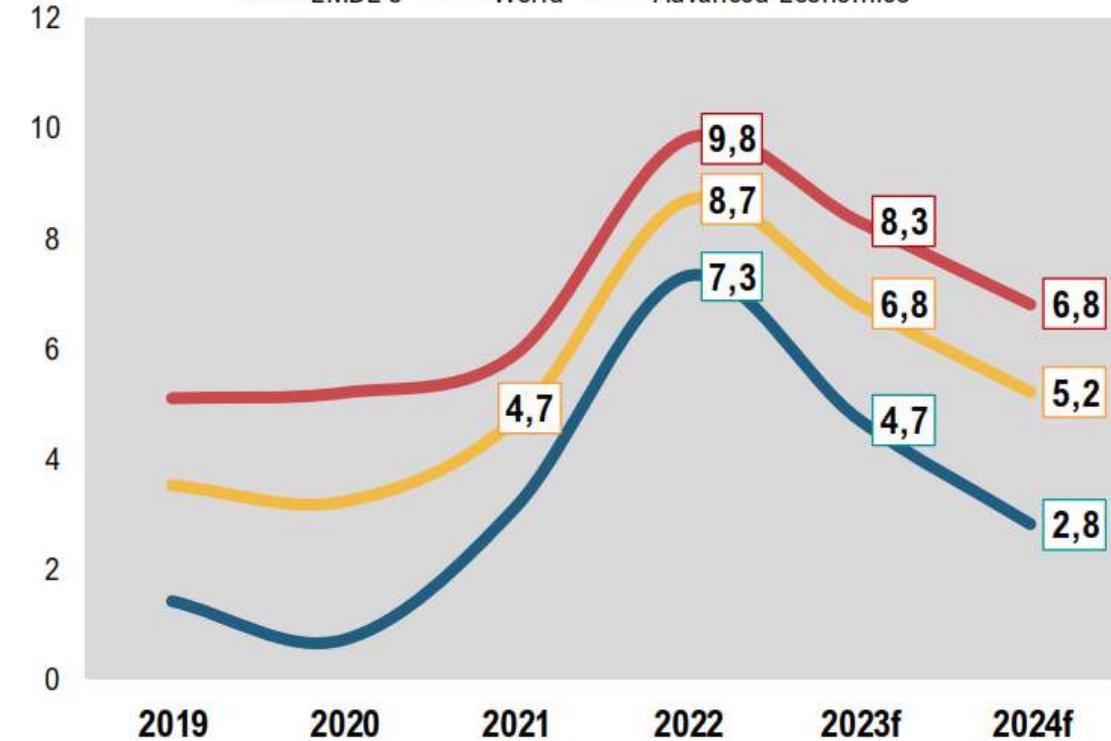
Pertumbuhan PDB Global, % yoy

■ 2019 ■ 2020 ■ 2021 ■ 2022 ■ 2023f ■ 2024f



Tingkat Inflasi, % yoy

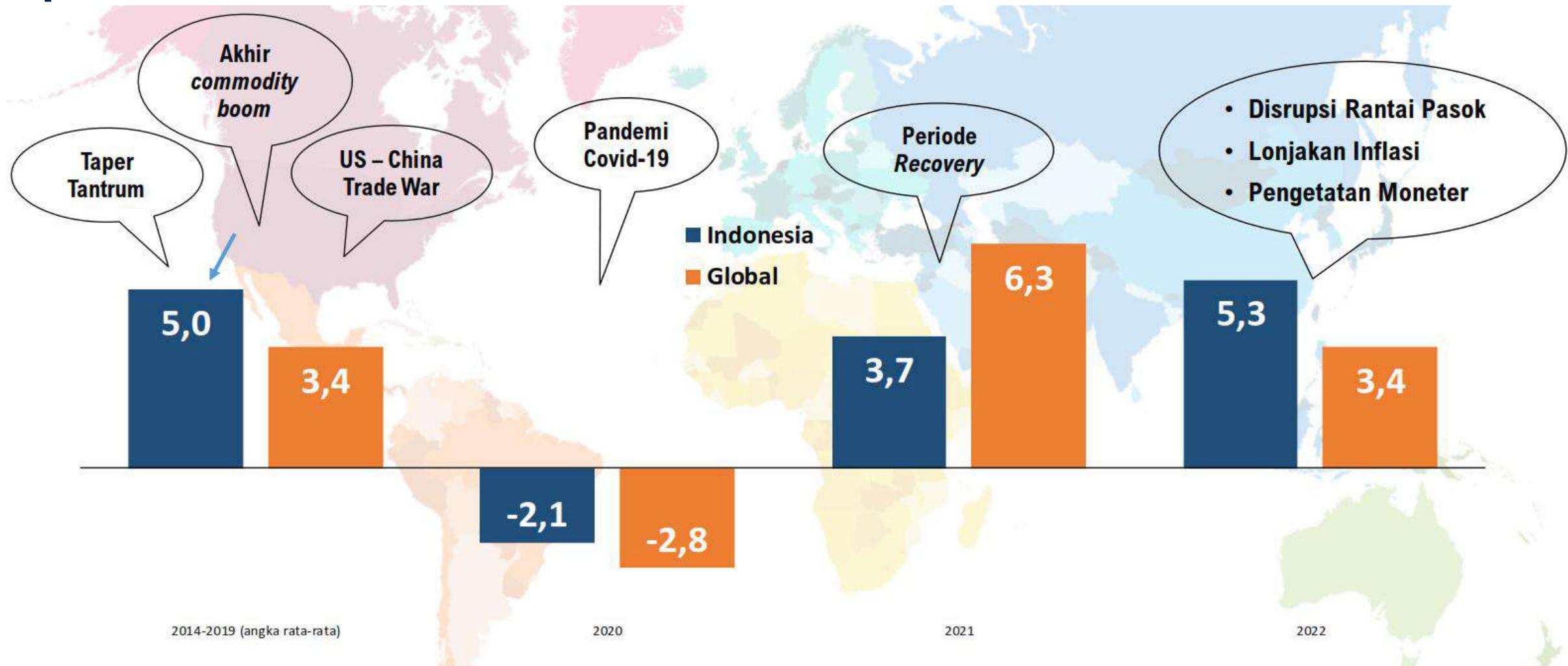
— EMDE's — World — Advanced Economies



**Downside risks
yang diwaspadai**

- ✓ Tekanan sektor keuangan
- ✓ *Debt distress*
- ✓ intensifikasi perang di Ukraina
- ✓ *Geoeconomics fragmentation*
- ✓ Tingkat inflasi persisten tinggi
- ✓ Suku bunga *higher for longer*

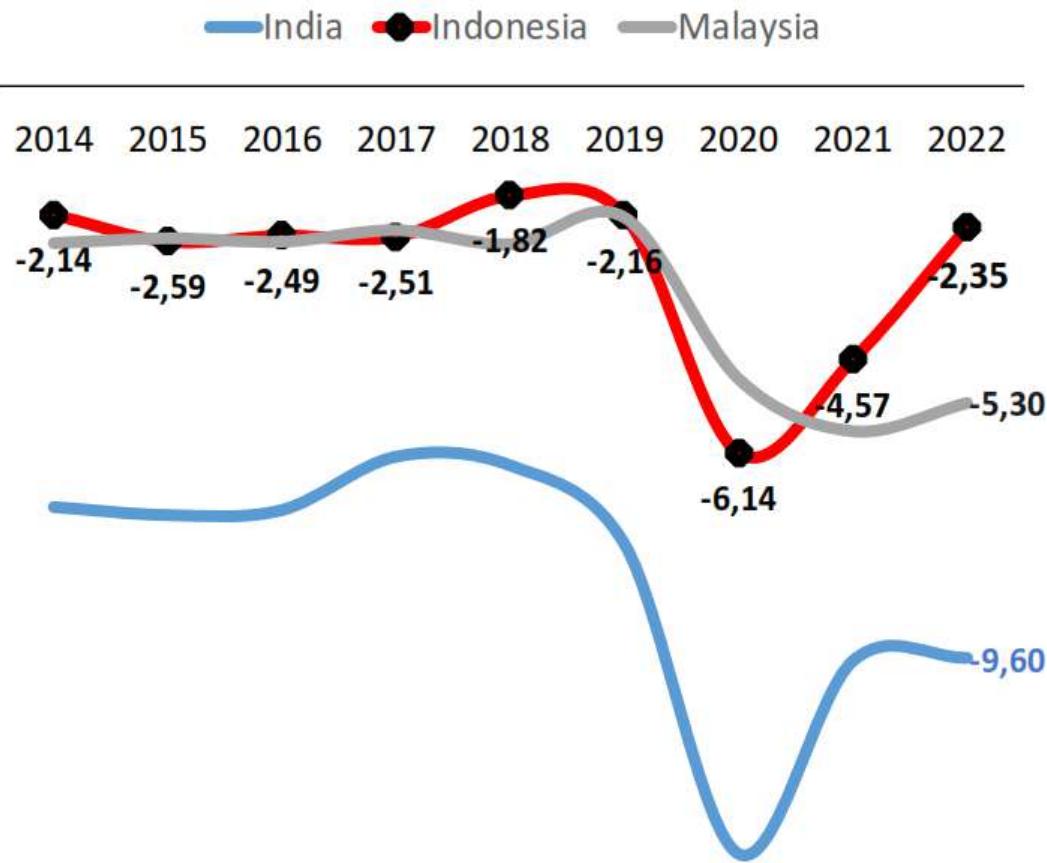
PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA TETAP MASIH CUKUP RESILIEN TERHADAP GUNCANGAN GLOBAL



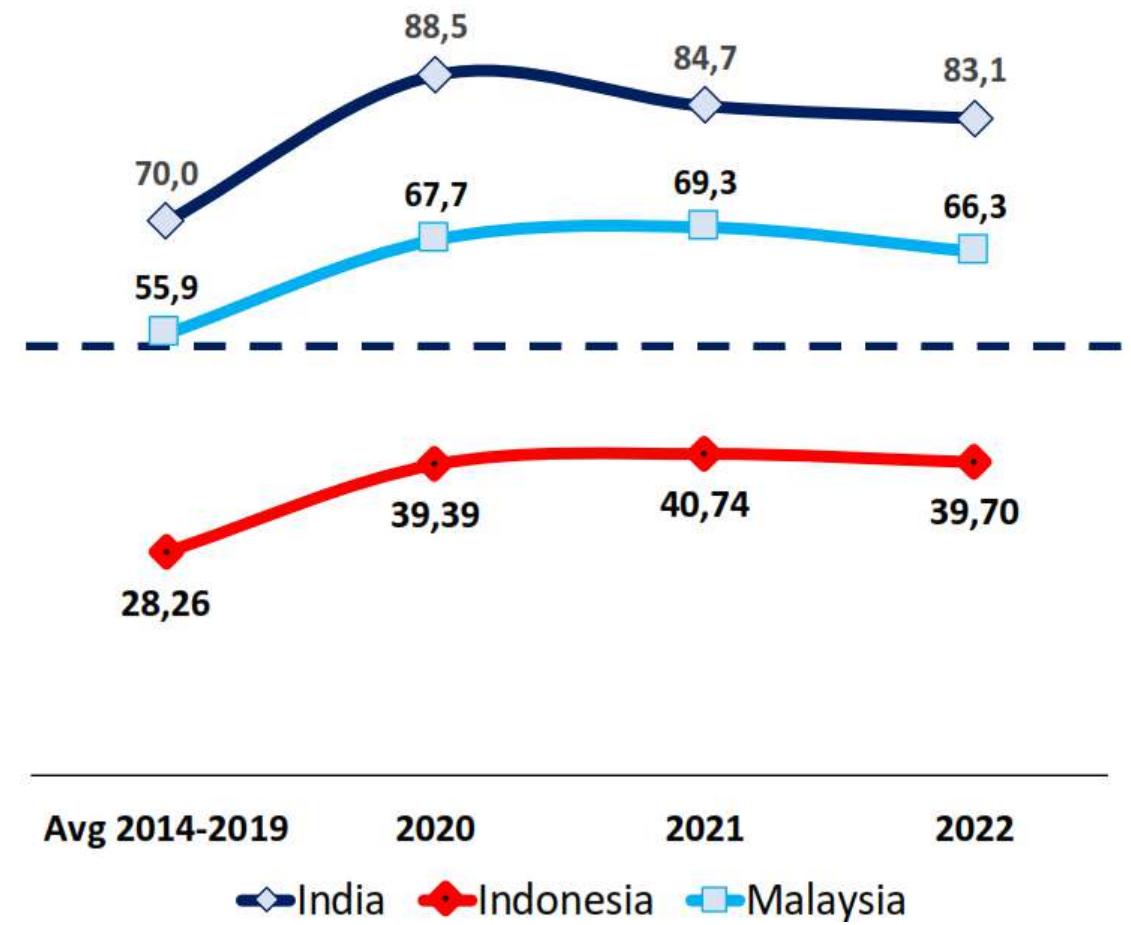
Sumber: Kementerian Keuangan, 2023

KEBIJAKAN FISKAL MASIH CUKUP TANGGUH DAN EFEKTIF

Defisit Fiskal 2014 - 2022
(% PDB)



Rasio Hutang Pemerintah 2014 - 2022
(% PDB)



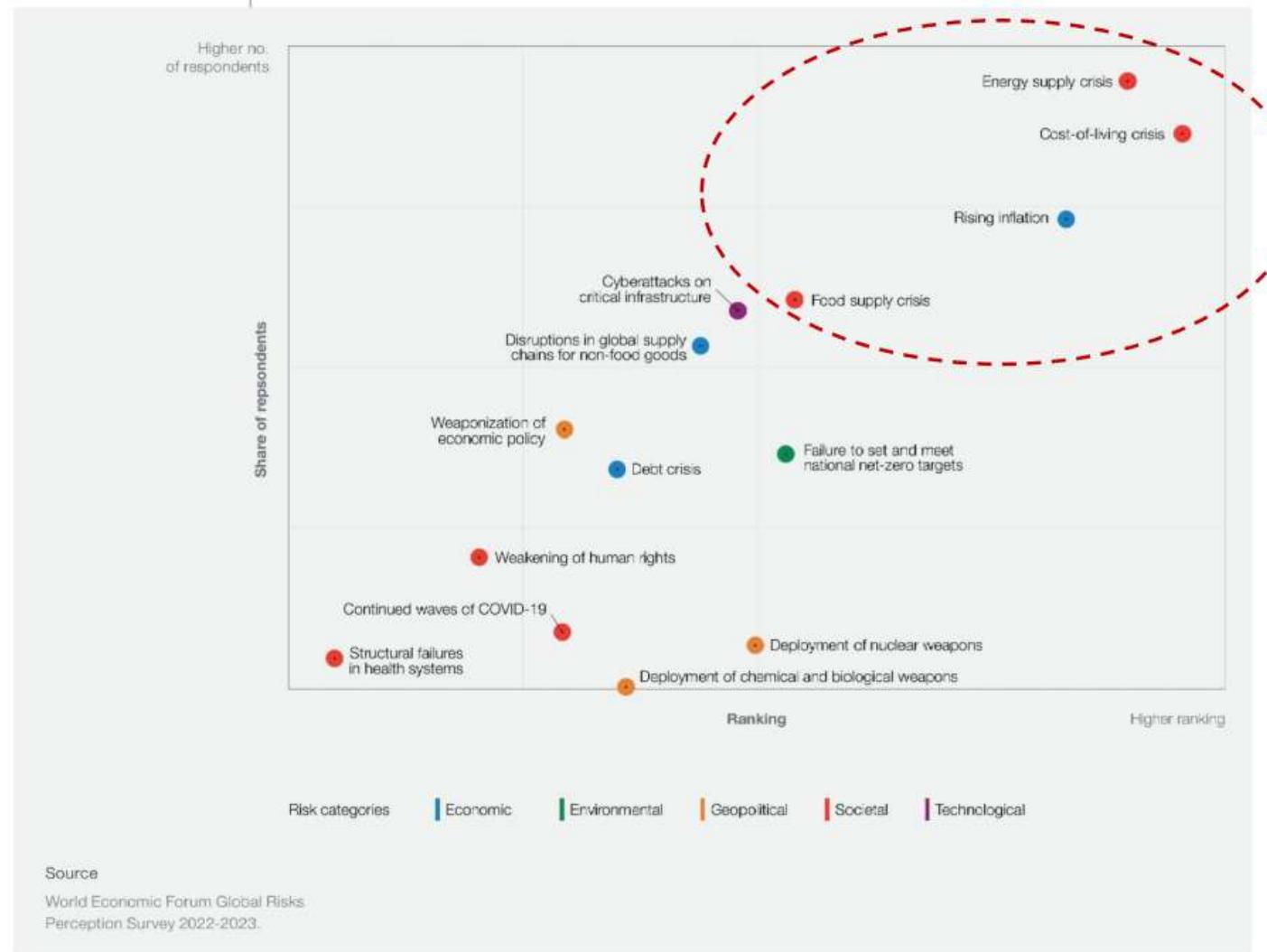
Sumber: Kementerian Keuangan, 2023

Biaya hidup
jadi batu
sandungan
akselerasi
perekonomian

FIGURE 1.1

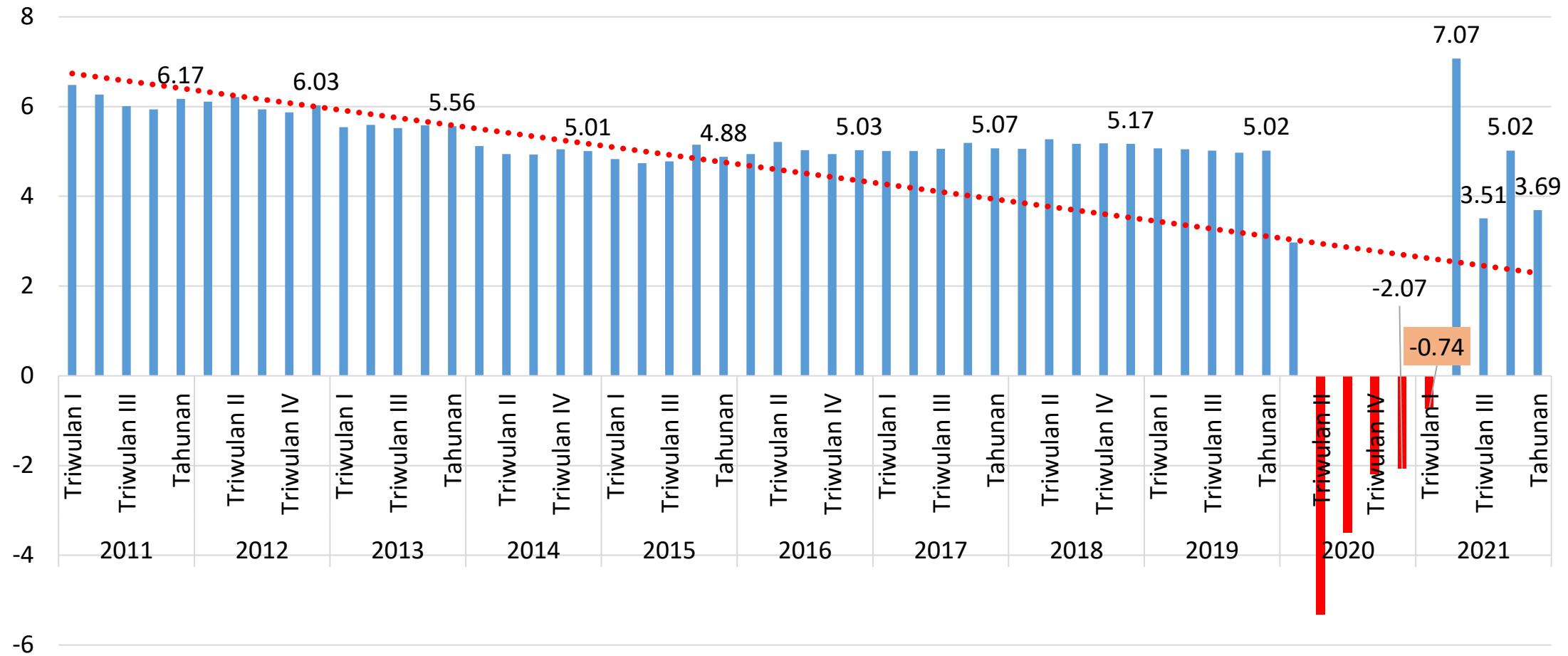
Currently manifesting risks

"Please rank the top 5 currently manifesting risks in order of how severe you believe their impact will be on a global level in 2023."



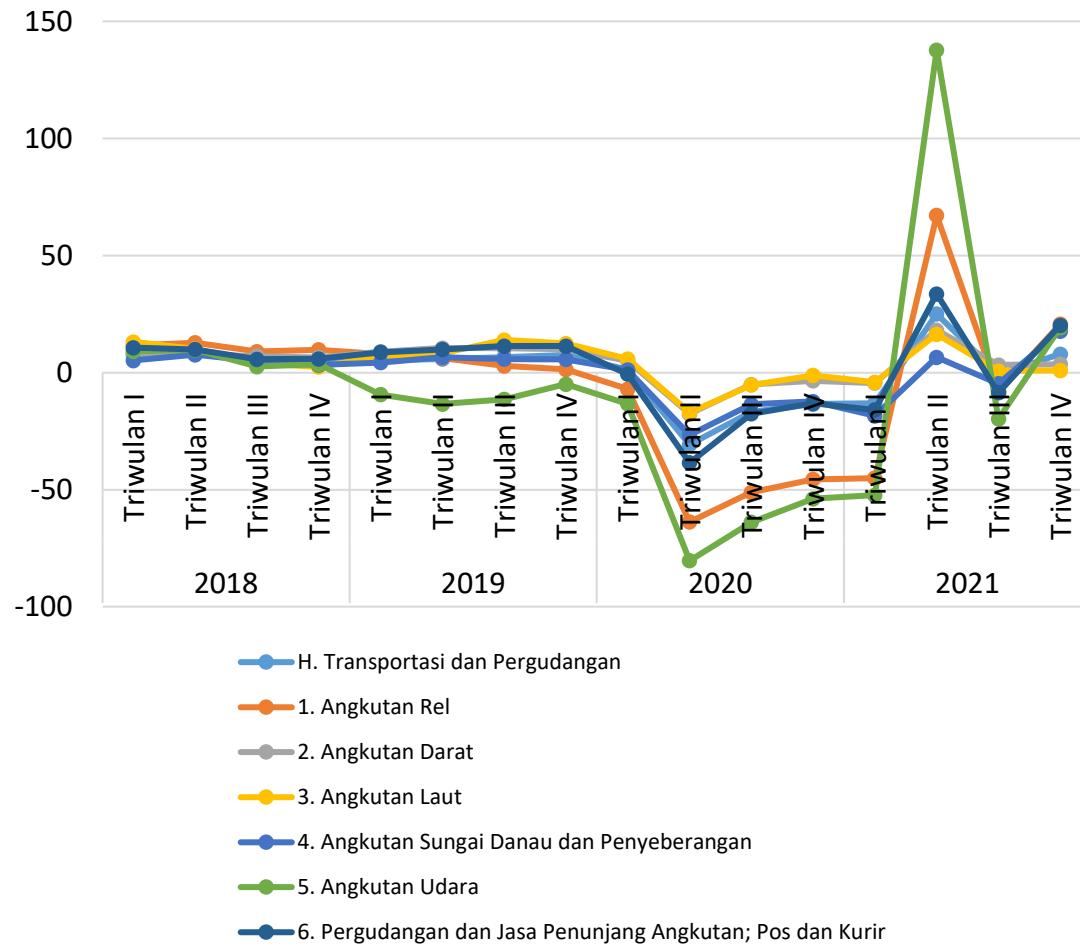
Sumber: WEF, 2023

Target dan Realisasi Pertumbuhan Ekonomi

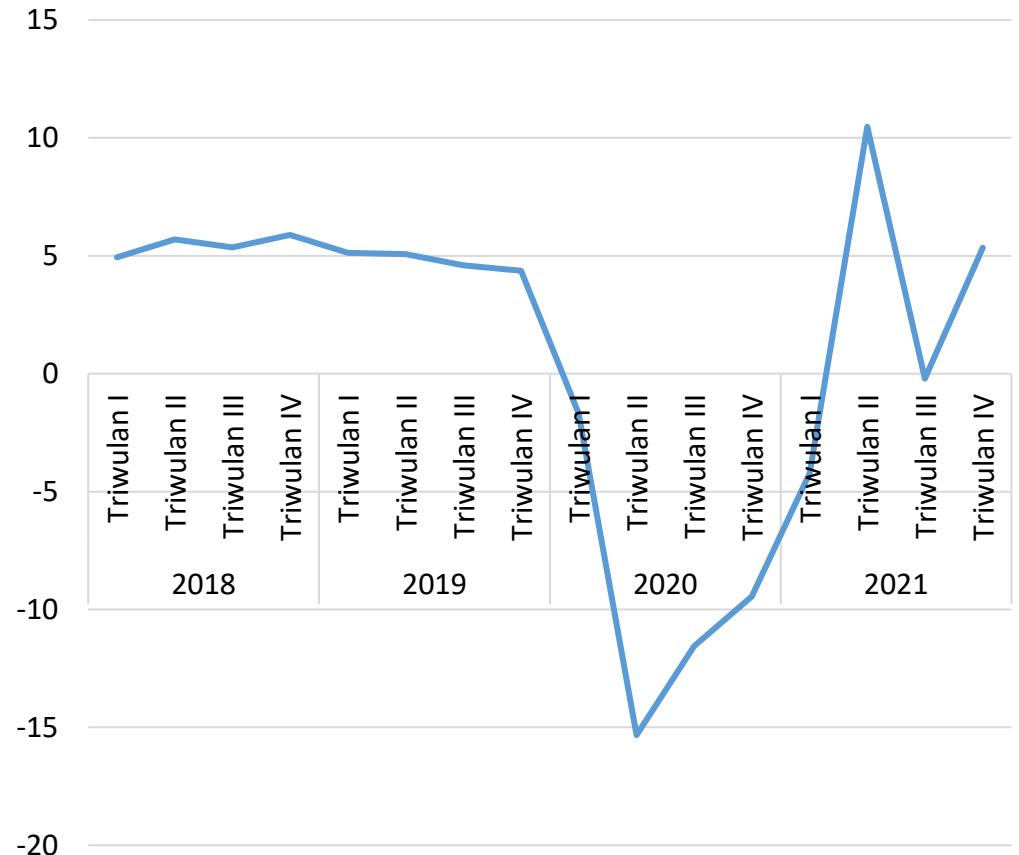


Sumber : BPS,2022, data y-o-y

Sektor Lapangan Usaha Mulai Bergeliat



Pertumbuhan Pengeluaran Konsumi Rumah Tangga:
e. Transportasi dan Komunikasi



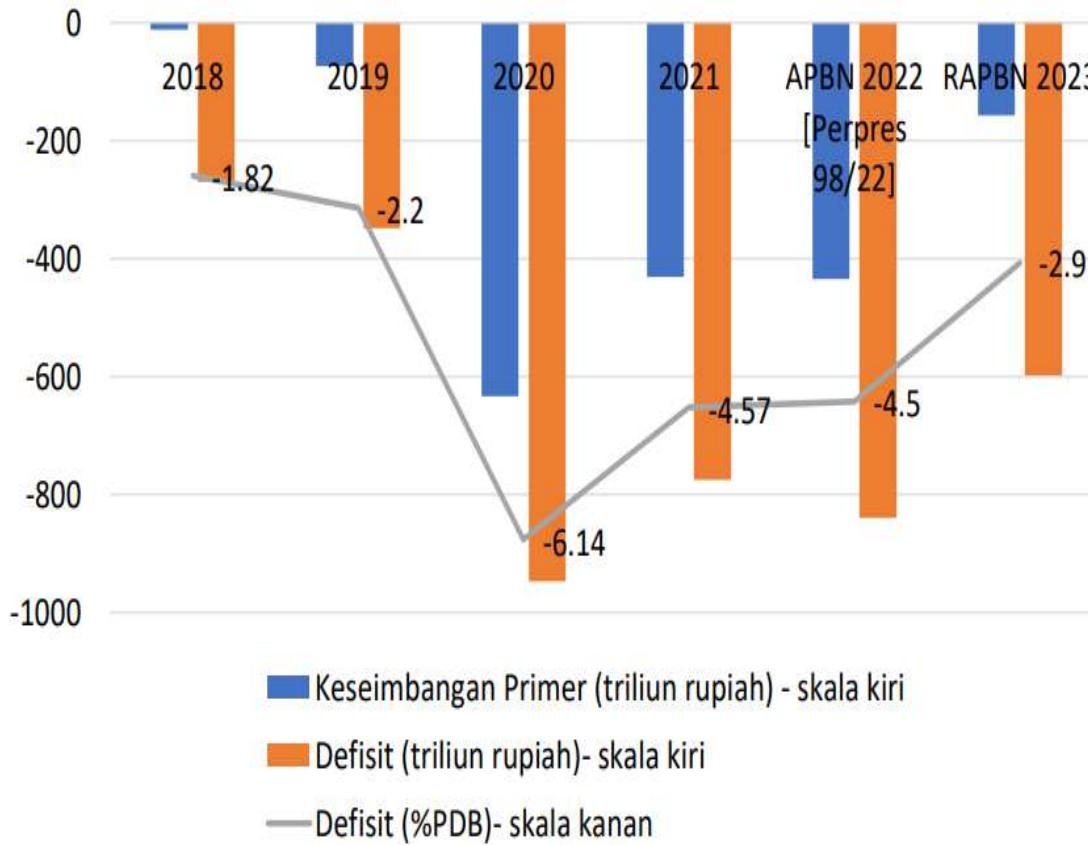
Sumber : BPS,2022, data y-o-y

Kesiapan Ketahanan Fiskal dan Moneter di Tengah Ketidakpastian Global dan Nasional

KETAHANAN FISKAL DAN RESPON KEBIJAKAN MONETER PASCA PANDEMI

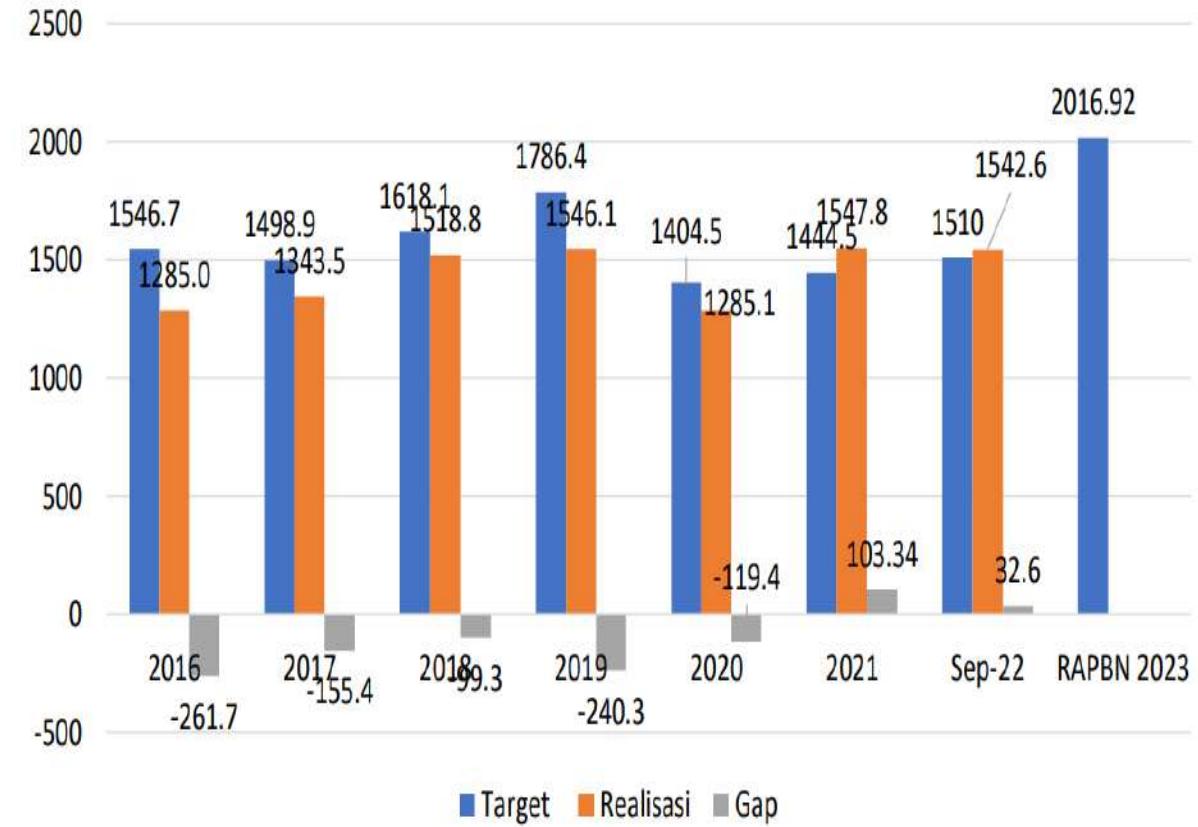
Di tahun 2023 angka defisit kembali sesuai dengan Penjelasan Pasal 12 ayat 3 Undang Undang No 17 Tahun 2003, yaitu defisit anggaran dibatasi maksimal 3 persen dan utang maksimal 60 persen dari produk domestik bruto.

Perkembangan Defisit APBN



Sumber: Kementerian Keuangan, Nov 2022

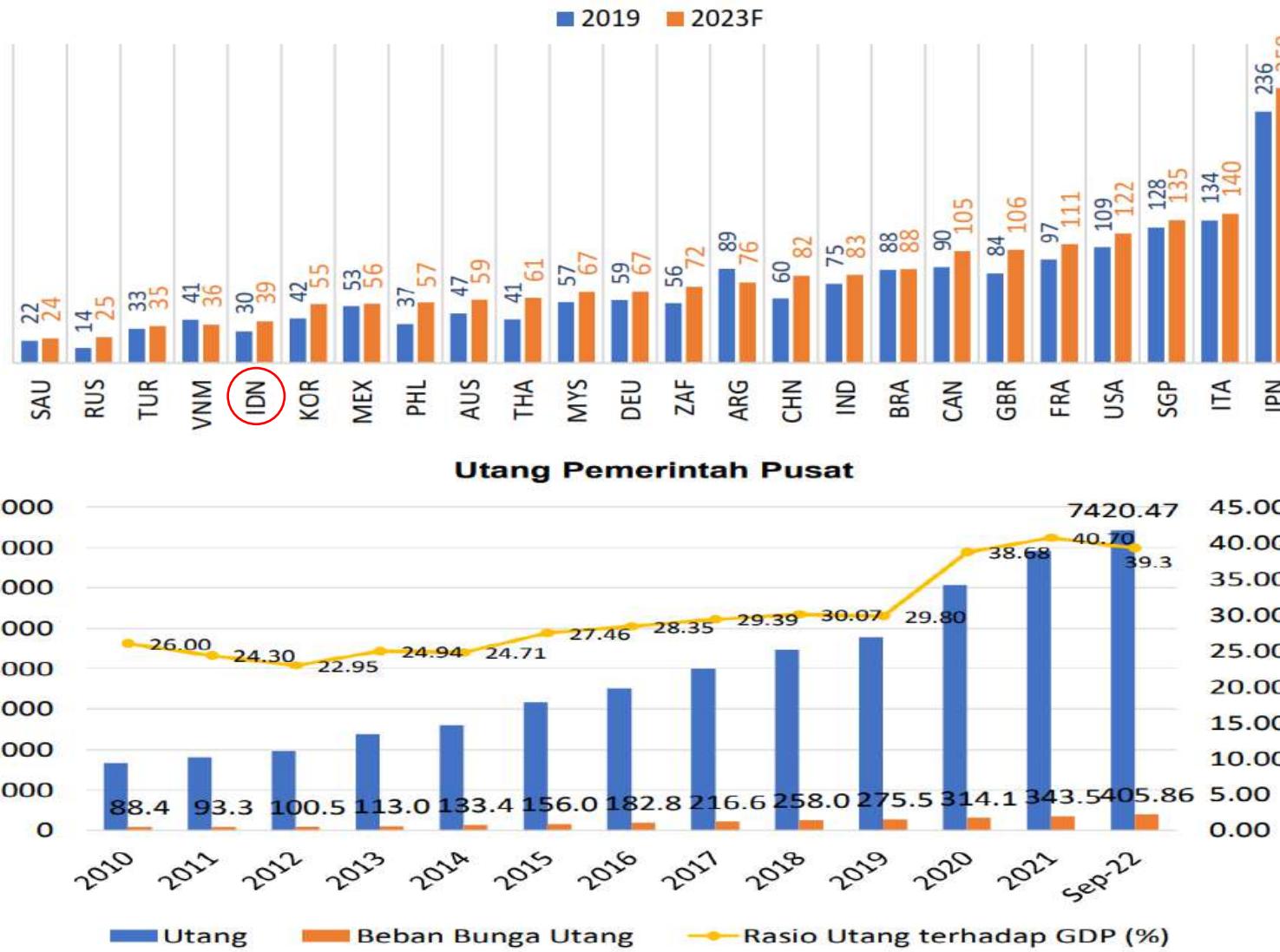
Target dan Realisasi Pendapatan Perpajakan



Tingginya harga komoditas ekspor Indonesia di tingkat global dan implementasi UU Harmonisasi Perpajakan membuat target pajak optimis melebihi target di 2022, sam aseperti penerimaan pajak di 2021. Penerimaan perpajakan yang melebih target ini dapat mengurangi defisit APBN.

RUANG FISKAL DAN UTANG PEMERINTAH PUSAT

Bunga utang Indonesia terus meningkat tiap tahunnya, sehingga porsinya di total belanja pemerintah pusat mencapai 17 persen



- Indikator ketahanan fiskal yang dilihat dari debt to GDP ratio, debt to income ratio, debt service ratio to revenue, dan interest to revenue ratio dalam satu dekade terakhir mengalami tren peningkatan dengan puncaknya di 2020.
- Pada 2020 nilai debt to GDP ratio sebesar 39.4 persen; debt to income ratio sebesar 368.9 persen; debt service ratio to revenue sebesar 46.8 persen; dan interest to revenue ratio sebesar 19.1 persen.
- Peningkatan indikator fiskal terjadi terutama ketika terjadi lonjakan rata-rata akumulasi utang pemerintah sebesar 475.92 triliun rupiah sejak 2011-2021. Selain itu, keseimbangan primer pada anggaran 2022 dan 2023 yang masih negatif menunjukkan bahwa ada risiko keterbatasan ruang gerak untuk mengurangi beban utang

Sumber: Kementerian Keuangan, Nov 2022 dan 2023

RUANG POSTUR APBN 2024

Defisit anggaran dipertahankan dalam batas besaran di bawah 3 persen sejak 2022.

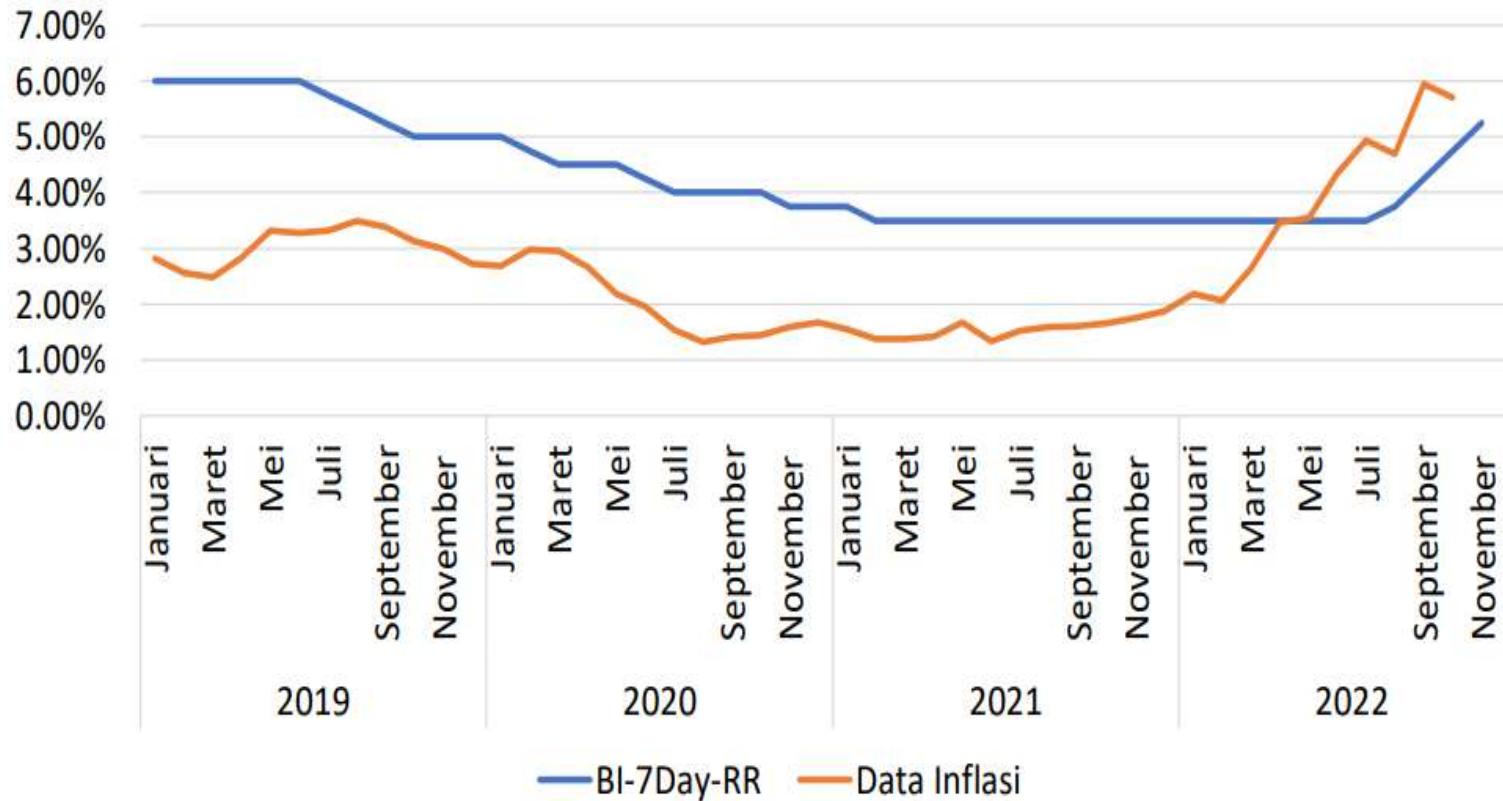
Uraian (triliun Rupiah)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	growth thd Outlook (%)	
	LKPP	APBN	Outlook	RAPBN									
A. PENDAPATAN NEGARA	1.550,5	1.508,0	1.555,9	1.666,4	1.943,7	1.960,6	1.647,8	2.011,3	2.635,8	2.463,0	2.637,2	2.781,3	5,5
a.l.: I. Penerimaan Perpajakan	1.146,9	1.240,4	1.285,0	1.343,5	1.518,8	1.546,1	1.285,1	1.547,8	2.034,6	2.021,2	2.118,3	2.307,9	8,9
1. Penerimaan Pajak	985,1	1.060,8	1.106,0	1.151,0	1.313,3	1.332,7	1.072,1	1.278,6	1.716,8	1.718,0	1.818,2	1.986,9	9,3
2. Pendapatan Kepabeanan dan Cukai	161,7	179,6	179,0	192,5	205,5	213,5	213,0	269,2	317,8	303,2	300,1	321,0	7,0
II. Penerimaan Negara Bukan Pajak	398,6	255,6	262,0	311,2	409,3	409,0	343,8	458,5	595,6	441,4	515,8	473,0	(8,3)
B. BELANJA NEGARA	1.777,2	1.806,5	1.864,3	2.007,4	2.213,1	2.309,3	2.595,5	2.786,4	3.096,3	3.061,2	3.123,7	3.304,1	5,8
I. Belanja Pemerintah Pusat	1.203,6	1.183,3	1.154,0	1.265,4	1.455,3	1.496,3	1.833,0	2.000,7	2.280,0	2.246,5	2.298,2	2.446,5	6,5
1. Belanja K/L	577,2	732,1	684,2	765,1	846,6	873,4	1.059,6	1.190,8	1.084,7	1.000,8	1.085,5**	1.086,6 *	0,1
2. Belanja Non K/L	626,3	451,2	469,8	500,2	608,8	622,9	773,3	809,9	1.195,4	1.245,6	1.212,8	1.359,9	12,1
II. Transfer Ke Daerah	573,7	623,1	710,3	742,0	757,8	813,0	762,5	785,7	816,2	814,7	825,4	857,6	3,9
C. KESEIMBANGAN PRIMER	(93,3)	(142,5)	(125,6)	(124,4)	(11,5)	(73,1)	(633,6)	(431,6)	(74,1)	(156,8)	(49,0)	(25,5)	(47,9)
D. DEFISIT ANGGARAN (A - B)	(226,7)	(298,5)	(308,3)	(341,0)	(269,4)	(348,7)	(947,7)	(775,1)	(460,4)	(598,2)	(486,4)	(522,8)	7,5
% Defisit terhadap PDB	(2,25)	(2,59)	(2,49)	(2,51)	(1,82)	(2,20)	(6,14)	(4,57)	(2,35)	(2,84)	(2,30)	(2,29)	
E. PEMBIAYAAN ANGGARAN	248,9	323,1	334,5	366,6	305,7	402,1	1.193,3	871,7	591,0	598,2	486,4	522,8	7,5
a.l.: I. Pembiayaan Utang	255,7	380,9	403,0	429,1	372,0	437,5	1.229,6	870,5	696,0	696,3	406,4	648,1	59,5
II. Pembiayaan Investasi	(8,9)	(59,7)	(89,1)	(59,8)	(61,1)	(49,4)	(104,7)	(142,5)	(106,7)	(176,0)	(153,4)	(176,2)	14,9

Sumber: Kementerian Keuangan, 2023

INFLASI DAN RESPON KEBIJAKAN MONETER

Pada Oktober peningkatan suku bunga acuan BI diikuti dengan penurunan angka inflasi Oktober (yoY) meski masih tinggi, suku bunga acuan naik 50 bps ke 4.75 persen dan inflasi turun ke 5.71 persen dari 5.95 persen di September. Bahkan januari 2023 kembali naik.

Perkembangan Inflasi dan
Suku Bunga Acuan Bank Indonesia



Laporan Survei Pembiayaan Perbankan Oktober 2022 yang dikeluarkan Bank Indonesia terlihat adanya penurunan penyaluran kredit baru pada kredit investasi, kredit modal kerja, kredit konsumsi, dan kredit konsumsi lainnya pada Oktober 2022. Penurunan ini juga dipicu oleh pesimisme pelaku usaha terhadap permintaan produk baik domestik dan global

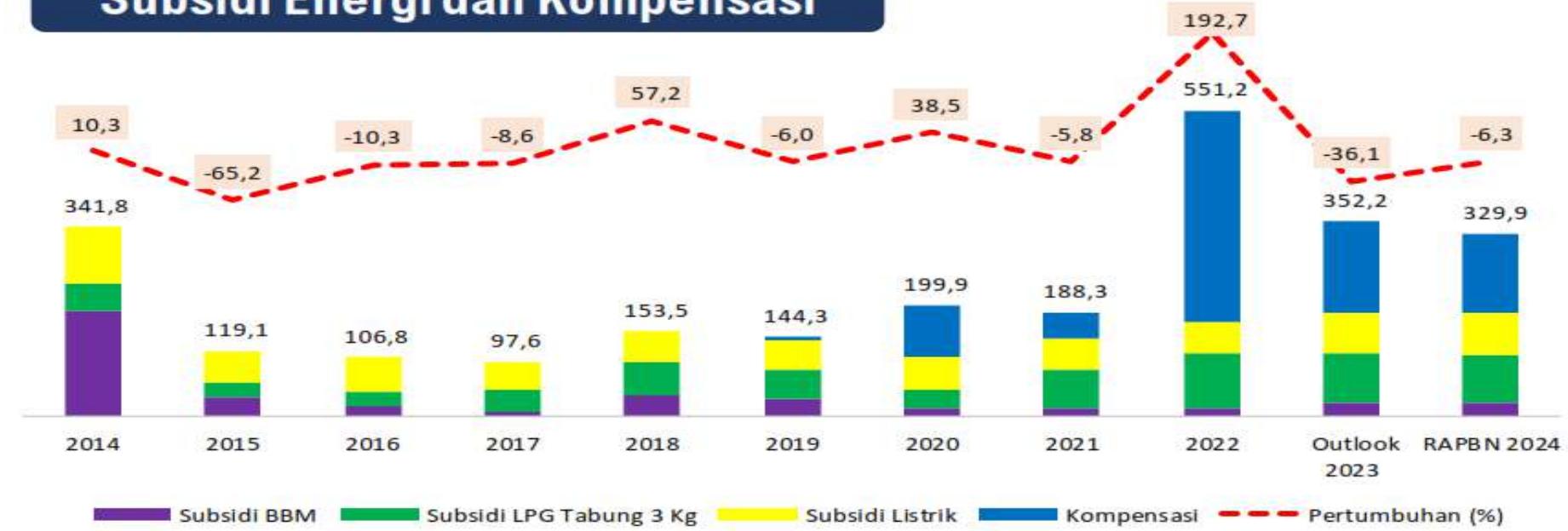
Sumber: Bank Indonesia, 2022

KEBIJAKAN FISKAL: SUBSIDI ENERGI DAN NON ENERGI APBN 2024

Subsidi Energi dan Kompensasi

Subsidi Energi dan Non-Energi Tumbuh Untuk APBN Outlook 2023 dan 2024. Hal ini menunjukkan dorongan produksi dan konsumsi dari subsidi ini menjadi besar.

Hanya saja peruntukannya di tahun politik sangat rawan terjadinya ketepatan sasaran.



Subsidi Non Energi

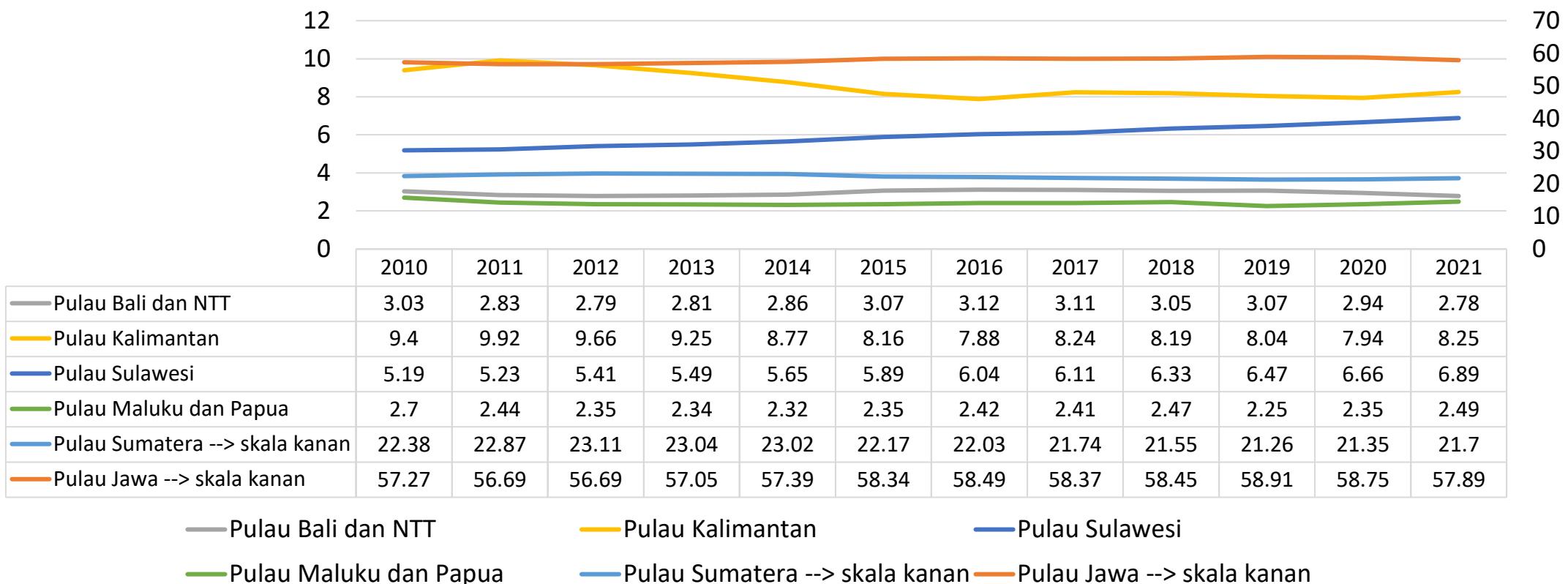


Sumber: Kementerian Keuangan, 2023

Pemerataan Pembangunan dan Kemiskinan

Jalan Panjang Menuju Pemerataan

Distribusi PDRB Terhadap Jumlah PDRB 34 Provinsi Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Provinsi (Persen)



Sumber : BPS,2022

DISTRIBUSI INFLASI NASIONAL DAN REGIONAL SEPTEMBER 2023 (yoY)

Seluruh kota mengalami inflasi

Sumatera

Inflasi Tertinggi:
Tanjung Pandan (5,03%)

Kalimantan

Inflasi Tertinggi:
Kotabaru (3,66%)

Maluku Papua

Inflasi Tertinggi:
Manokwari (5,26%)

Jawa

Inflasi Tertinggi:
Sumenep (4,47%)

Bali Nusra

Inflasi Tertinggi:
Maumere (3,80%)

Sulawesi

Inflasi Tertinggi:
Luwuk (4,37%)
Inflasi Terendah:
Kota Manado (1,16%)

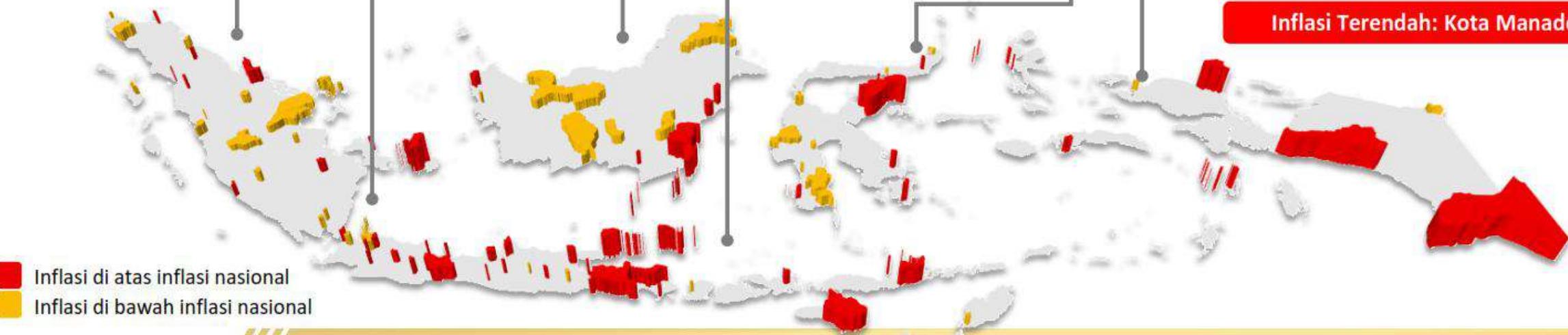
Komoditas Penyumbang Inflasi Manokwari

Komoditas	Andil (%)
1. Ikan Segar	1,46
2. Angkutan Udara	0,72
3. Beras	0,58
4. Rokok Kretek Filter	0,41
5. Tomat	0,39



Inflasi Tertinggi: Manokwari (5,26%)

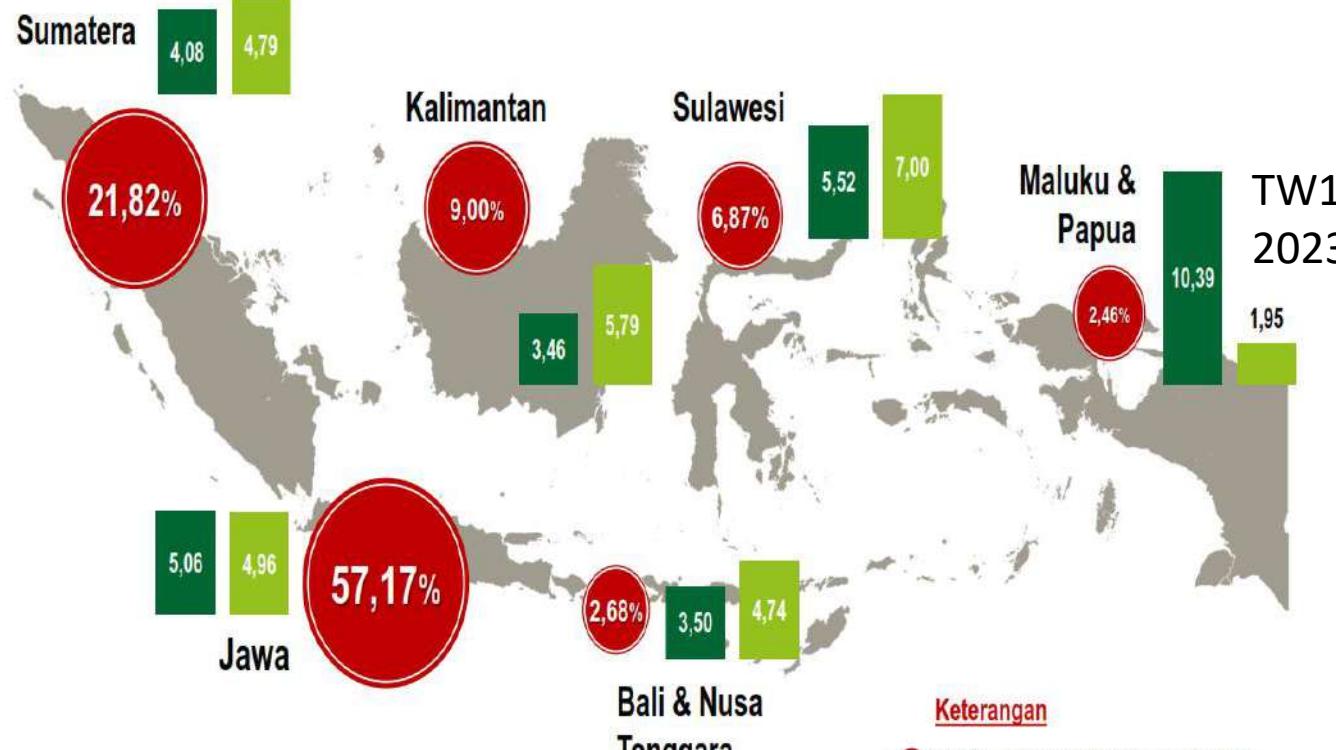
Inflasi Terendah: Kota Manado (1,16%)



Sumber: BPS, September 2023

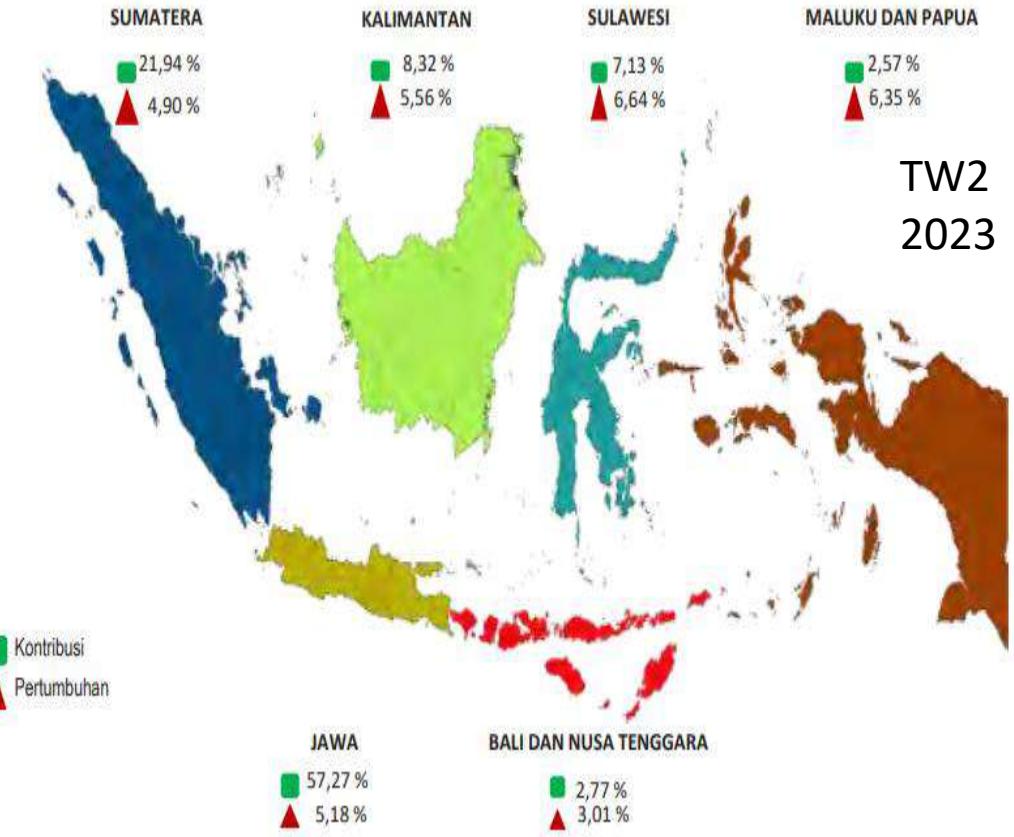
PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA MENURUT SPASIAL PULAU BESAR TW I DAN II 2023

Struktur perekonomian Indonesia secara spasial pada Tw I–2023 masih didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa yang memberikan kontribusi terhadap PDB sebesar 57,17 persen dan 57,27 persen



Keterangan

- Distribusi PDB ADHB Triwulan 1-2023
- Pertumbuhan Ekonomi Triwulan 1-2022
- Pertumbuhan Ekonomi Triwulan 1-2023



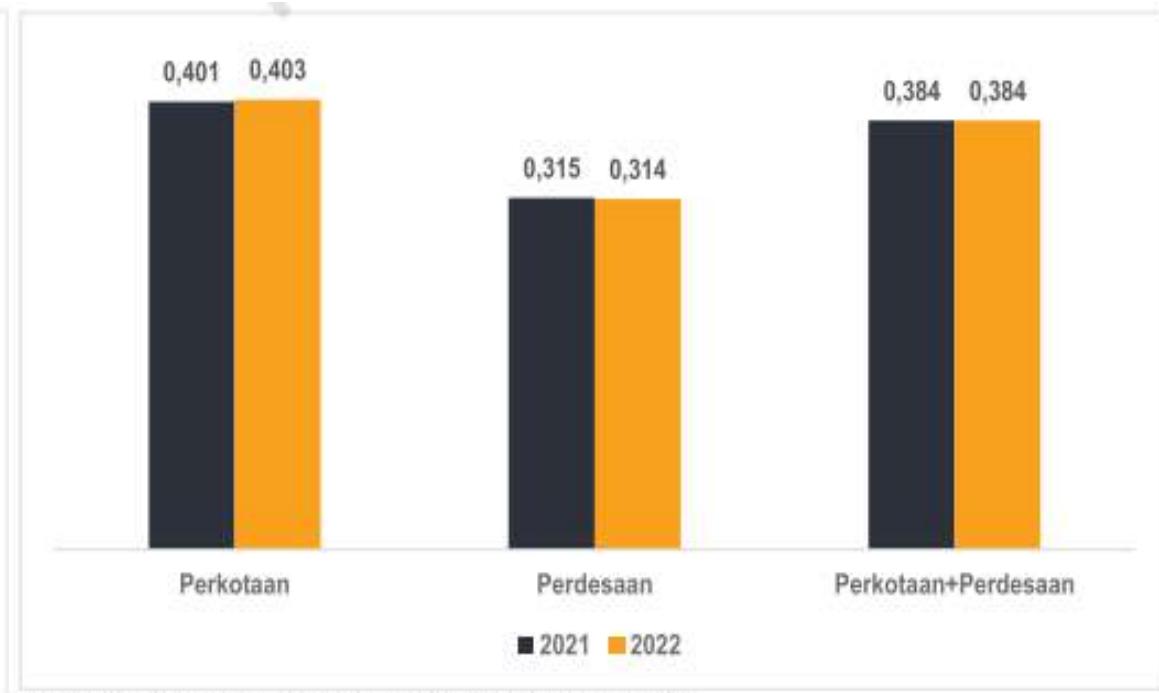
Sumber: BPS, Mei 2023 dan Agustus 2023

Ketimpangan Pengeluaran/Rasio Gini Rasio Menurut Daerah: Gini Ratio tidak berubah

Gini Ratio di perkotaan mengalami peningkatan dan mulai mengalami penurunan sejak tahun 2014 hingga 2019. Namun, pada 2020 hingga 2022 meningkat kembali. Sementara itu, pola berbeda terjadi di perdesaan. Pada periode 2012-2014, *Gini Ratio perdesaan* mengalami penurunan, dan meningkat pada tahun 2015 dan 2018. Selanjutnya pada periode 2019-2022 terus mengalami penurunan. *Gini Ratio merupakan ukuran tingkat ketimpangan pendapatan penduduk* yang banyak digunakan di berbagai negara. Perubahan *Gini Ratio* merupakan indikasi dari adanya perubahan distribusi pengeluaran penduduk.



Sumber : BPS, diolah dari data Susenas Konsumsi Pengeluaran Tahun 2012-2022 (Kondisi Maret)



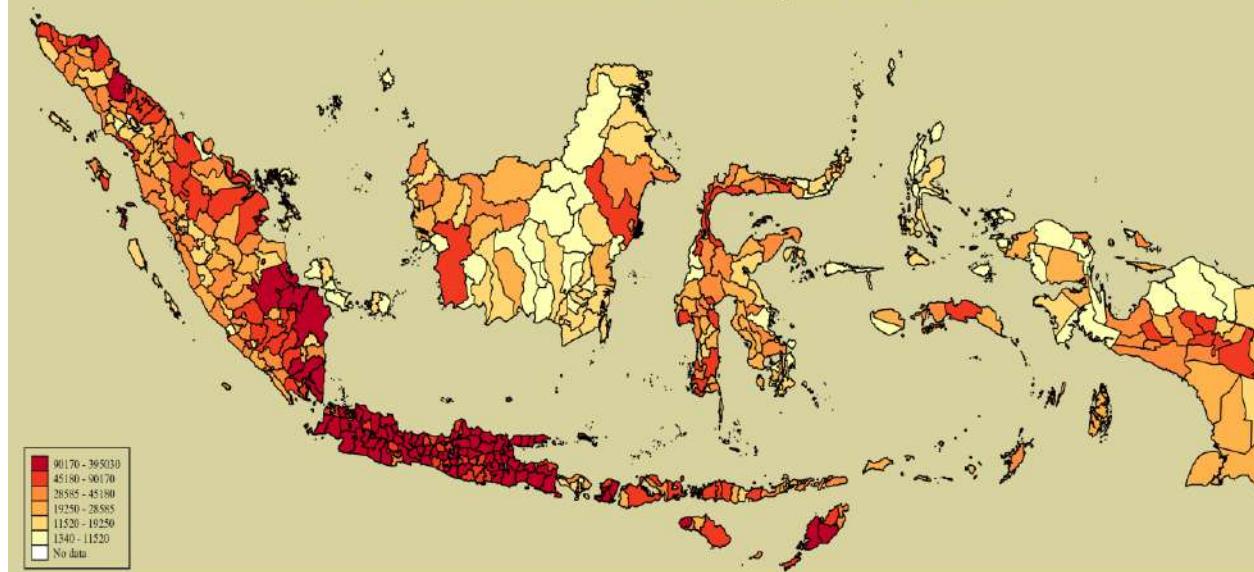
Sumber: Diolah dari data Susenas Maret 2021 dan Maret 2022

Sumber: BPS, 2023

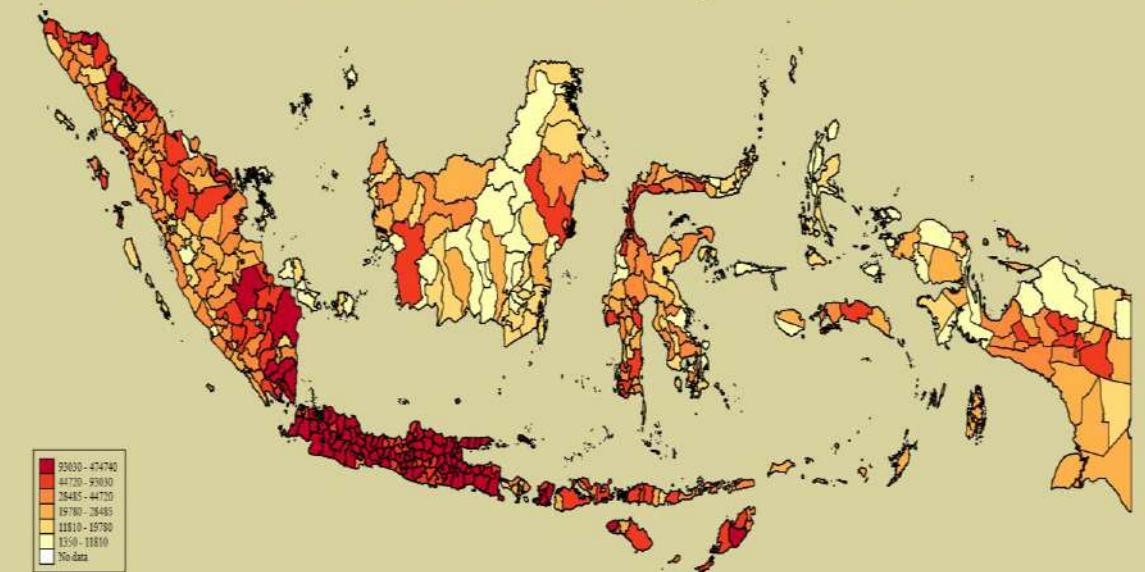
Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2019 dan 2022

Meskipun distribusi pertumbuhan ekonomi kontribusi terbesar adalah P. Jawa, namun tetap jumlah penduduk miskin berada di P. Jawa. Artinya daerah pertumbuhan ekonomi tinggi secara langsung tidak terjadi pemerataan kesejahteraan.

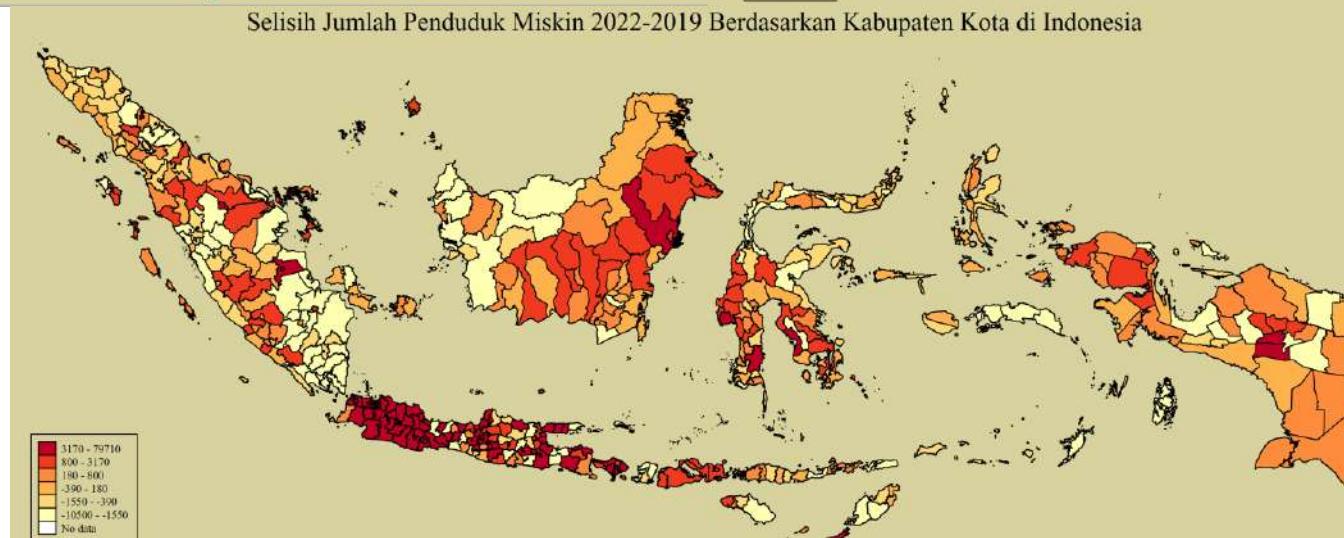
Jumlah Penduduk Miskin 2019 Berdasarkan Kabupaten Kota di Indonesia



Jumlah Penduduk Miskin 2022 Berdasarkan Kabupaten Kota di Indonesia



Selisih Jumlah Penduduk Miskin 2022-2019 Berdasarkan Kabupaten Kota di Indonesia





Terima Kasih

M. Rizal Taufikurahman

HP. 0813-1020-9021

rizal@idef.or.id